

BAB II

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM SEKTOR KETENAGAKERJAAN TERHADAP DINAMIKA MOBILITAS SOSIAL INDIA

Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja India menandai bagaimana perempuan dari berbagai kalangan mampu melalui mobilitas sosial yang menjadi penghalang perempuan untuk berkembang. Gambaran umum dari partisipasi perempuan, kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah India, hingga bagaimana aktor non negara berperan dalam permasalahan kesetaraan ini dapat menguraikan bagaimana subjek penelitian, objek penelitian, dan ruang lingkup penelitian memiliki keterkaitan yang terangkum menjadi masalah penelitian. Oleh karena itu, pendahuluan mengenai kondisi demografis ketenagakerjaan perempuan di India menjadi aspek penting, sehingga melalui data tersebut terlihat bagaimana partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja di India saat ini. Keterbukaan terhadap partisipasi perempuan, menjadi pintu masuk terhadap bagaimana kebijakan pemerintah India terhadap isu ketenagakerjaan tersebut yang menjadi cetak biru. Kebijakan pemerintah yang telah diterapkan sebelumnya saling terkait terhadap keterlibatan NGO dalam menekan ketimpangan yang terjadi pada perempuan India. Melalui gambaran-gambaran tersebut, realita partisipasi perempuan dalam isu ketenagakerjaan menjadi transparan, sehingga terlihat bagaimana kebijakan tersebut di advokasi dengan program-program NGO yang spesifik dan terarah kepada perempuan.

2.1 Warisan Kolonial sebagai Hambatan Sosial Partisipasi Perempuan di Sektor Ketenagakerjaan India

Konteks ketidaksetaraan ini merupakan bagian dari penindasan kelas, ras, kasta, dan warna kulit yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan sebagai warisan kolonial dan pasca kolonial dan lebih banyak menyorot kebiasaan koloni untuk menindas kelompok perempuan karena gender mereka. Faktor yang mendorong adanya ketimpangan terhadap perempuan di India dalam memperoleh spektrum pekerjaan yang lebih luas dan berkembang, dapat ditarik melalui rekam jejak India pada masa kolonialisme. India telah mengalami sejarah kolonialisme selama 250 tahun oleh Inggris. Dalam kurun ratusan tahun tersebut, warisan yang diberikan oleh kolonial Inggris terhadap masyarakat India, terutama perempuan, memberikan traumatis dan subjektifitas terhadap perempuan. Pada tahun 1908, ahli sejarah menulis tentang sejarah kolonialisme Belanda yang terjadi di Sri Lanka, dalam tulisannya ahli tersebut mengatakan bahwa kekayaan ekonomi pribumi secara brutal dikekang dan dihancurkan untuk menjamin keuntungan monopoli. Belanda datang dan menganggap pribumi sebagai pencetak uang, faktor yang diperlakukan dengan cara objektif layaknya air, tanah, atau unsur tidak bernyawa lainnya (Mosse, 1996, pp. 113-115).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pribumi merupakan manifestasi dari 'alam', yakni air, tanah, dan unsur tidak bernyawa lainnya yang dapat dieksploitasi secara masif dan tidak harus dibayar. Lebih lanjut, Mosse juga menjelaskan bahwa manifestasi pribumi sebagai 'alam' juga ditujukan

kepada perempuan di masa kolonial karena menganggap tenaga kerja perempuan sebagai makhluk inferior. Pada masa kolonial di India, laki-laki mendapatkan setidaknya porsi yang lebih baik daripada perempuan karena diizinkan menguasai sebagian ‘alam’ dan menganggap hal tersebut sebagai kekayaan ‘alam’ atas koloninya. Perempuan di India menjadi kelompok yang ter subordinasi, selain karena anggapan inferior yang didapatkan perempuan di masa kolonialisme, warisan kolonial menjadi sebuah akar permasalahan di negara yang menjunjung stratifikasi (Mosse, 1996, p. 116). India merupakan negara yang kental dengan kultur stratifikasi, oleh karena itu, isu perempuan menjadi permasalahan yang berangkat dari warisan kolonial Inggris.

Invasi Inggris membawa bencana dan kesengsaraan bagi penduduk India. Kemiskinan ekstrem dan kematian penduduk lokal menunjukkan bahwa kehadiran Inggris tidak memberikan manfaat dan kemajuan pembangunan bagi India, melainkan kesengsaraan total bagi seluruh lapisan masyarakat India (Sullivan & Hickel, 2022). Permasalahan perempuan di India berdasarkan kolonialisme Inggris merupakan isu yang berakar dari kultur atau kebudayaan sosial yang tidak mampu menghalau hadirnya invasi asing ke India. Terdapat keterkaitan antara imperialisme dan dominasi laki-laki bagi kesejahteraan dan kesetaraan perempuan di India pada masa kolonialisme Inggris. Hal tersebut membuktikan dua hal yang mampu mendefinisikan adanya warisan kolonial Inggris dan pemanfaatan subordinasi perempuan terhadap legitimasi pemerintahan kolonial (Liddle & Joshi, 1985, p. 73). Kolonialisme Inggris menunjukkan intensi penerapan nilai liberal yang dianut negara barat untuk diimplementasikan di negara berkembang, yakni India. Hal yang

dilakukan Inggris adalah merevitalisasi hukum di India, yakni dengan asumsi meliberalisasi posisi perempuan dalam masyarakat dengan menghapus budaya Sati —*tradisi pembakaran diri janda sebagai bentuk kesetiaan terhadap mendiang suami*— dan pernikahan anak memacu ketertinggalan India karena menganut budaya kuno yang menekan status sosial perempuan (Nandwani & Roychowdhury, 2023). Inggris merevitalisasi hukum Brahmin yang berbasis pada budaya dan kustom menjadi hukum ala negara barat yang sifatnya tertulis dan berdasarkan preseden hukum. Revitalisasi hukum yang dilakukan Inggris sarat akan respon baik bagi kelompok liberal karena menghapus hukum dan aturan yang menjerat perempuan di India dari kebebasan dalam berumah tangga maupun dalam bersosialisasi. Meskipun hal tersebut terlihat transparan terhadap perlindungan perempuan, namun di beberapa bidang kolonial Inggris justru menunjukkan kebijakan yang jauh dari progresif. Hal ini ditunjukkan dengan pengembalian hak suami-istri yang mengikat perempuan untuk tetap dalam status pernikahan meskipun merugikan pihak perempuan atau akan dihukum penahanan bahkan menyerahkan sepenuhnya kuasa seksualitas hanya kepada pihak suami. Terdapat pula kebijakan kolonial Inggris yang kontras dengan perempuan terhadap isu prostitusi, hak pilih perempuan, dan ketimpangan perempuan terhadap imperialisme Inggris lainnya (Liddle & Joshi, 1985, pp. 74-75).

2.2 Perempuan pada Pasar Tenaga Kerja India

India menjadi negara populasi terbanyak di dunia berdasarkan data World Bank dengan jumlah penduduk mencapai 1,44 miliar. Pada tahun 2021, pertumbuhan penduduk ini meningkat sebanyak 0.8% dari pertumbuhan penduduk

tahun sebelumnya dan menunjukkan adanya fluktuasi dari populasi India per sepuluh tahun. Kepadatan penduduk tersebut berkaitan dengan partisipasi angkatan kerja di India. Isu mengenai tenaga kerja di India menunjukkan bahwa terdapat gap atau jarak yang signifikan antara partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pemerataan kesempatan kerja di India.

Tabel 2.1 Partisipasi Pekerja Perempuan di India

Tahun	LFPR (dalam %)	WPR (dalam %)
2019-2020	30.0	28.7
2020-2021	32.5	31.4
2021-2022	32.8	31.7
2022-2023	37.0	35.9

Sumber: *Ministry of Labour and Employment, 2024*

Tabel diatas menunjukkan angka partisipasi angkatan kerja perempuan India di usia 15 tahun keatas dari 2019-2023. Data diatas memberikan perbandingan *Worker Population Ratio* (WPR) dan *Labour Force Participation Rate* (LFPR) perempuan India. WPR merupakan rasio keseluruhan penduduk India yang bekerja dari total keseluruhan populasi negara. Sementara LFPR merupakan angkatan kerja yang berada pada usia legal untuk bekerja, pada data ini secara khusus adalah perempuan. Berdasarkan data tersebut, angkatan kerja perempuan setiap tahunnya mengalami peningkatan, begitupun dengan rasio populasi India (Ministry of Labour & Employment, 2024).

Sulitnya mobilisasi perempuan terhambat adanya dinding pembatas kasta yang telah mengakar di India. Konstruksi sosial tersebut menjadi dilema bagi perempuan India karena budaya dan struktur sosial tersebut yang telah ada sejak sebelum penjajahan hingga saat ini, menyulitkan perempuan untuk mendapatkan penglihatan lebih luas mengenai kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan.

Dalam ranah global, isu kesetaraan menjadi poin penting dalam program pembangunan berkelanjutan, dinding pembatas kasta dan struktur sosial tersebut menjadi penghalang bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang layak dalam sektor ketenagakerjaan. Dalam porsi pemerataan profesi, perempuan lebih banyak terlibat hanya pada sektor agrikultur, sementara laki-laki memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk bekerja di sektor publik, jasa, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakadilan bagi perempuan dalam mendapatkan kesempatan memperoleh profesi yang lebih layak. Partisipasi perempuan dalam sektor ketenagakerjaan di wilayah kota dan desa pun perlu digarisbawahi bahwa terdapat jarak yang luas antara keterlibatan laki-laki dan perempuan pada sektor ketenagakerjaan.

Tabel 2.2 Keterlibatan Perempuan dalam Sektor Ketenagakerjaan Tahun 2017-2022

Tahun	Perkotaan		Pedesaan		Kota dan Pedesaan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2017-18	74.5	20.4	76.4	24.6	75.8	23.3
2021-22	74.7	23.8	78.2	36.6	77.2	32.8

Sumber: *Ministry of Labour and Employment*, 2023

Pembaharuan data ketenagakerjaan India yang ditunjukkan melalui data dari Kementerian Ketenagakerjaan India, dengan menganalisis partisipasi angkatan kerja yang diidentifikasi berdasarkan geografis dan gender. Pada tahun 2021-2022 keterlibatan perempuan dalam ketenagakerjaan sebesar 32,8% di wilayah desa dan kota dengan jumlah perempuan di desa sebesar 36,6% dan di kota 23,8%. Sementara partisipasi laki-laki berada pada persentase 32,8% di wilayah desa dan kota dengan masing-masing wilayah sebanyak 74,7% dan 78,2%. Angka demografi

tersebut menunjukkan bahwa kesempatan laki-laki lebih besar dalam memperoleh lapangan pekerjaan dibanding perempuan sehingga isu ketenagakerjaan di India menjadikan perempuan sebagai subjek permasalahan sosial-ekonomi. Meskipun begitu, demografis tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan partisipasi pekerja perempuan dari tahun 2017-2018 sampai 2021-2022 di wilayah perkotaan dan pedesaan sebesar 9,5%.

Isu ketenagakerjaan ini memfokuskan pada peningkatan partisipasi perempuan dalam FLFP di India melalui program yang dicanangkan pemerintah India dalam perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan bagi perempuan melalui kebijakan, undang-undang, maupun program berkelanjutan. Data demografi tersebut juga menunjukkan bahwa angka partisipasi pekerja perempuan masih rendah dibandingkan dengan partisipasi pekerja laki-laki, namun peningkatan yang terjadi setiap tahun di setiap wilayah di India menjadi sinyal optimistis bahwa partisipasi pekerja perempuan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Female Labour Force Participation (FLFP) atau partisipasi angkatan kerja perempuan adalah pendorong pertumbuhan dan oleh karena itu, tingkat partisipasi menunjukkan potensi suatu negara untuk tumbuh lebih cepat (Verick, 2014). FLFP seringkali digambarkan dalam bentuk persentase kelompok perempuan yang secara aktif bekerja atau mencari lapangan pekerjaan. FLFP memberikan pengaruh besar dalam indikator pembangunan suatu negara oleh karena itu, kuantitas dari partisipasi perempuan dipengaruhi dari faktor sosio-kultural serta kondisi makro-ekonomi dalam suatu negara. Tingginya angka FLFP menunjukkan terwujudnya pemberdayaan ekonomi perempuan di suatu negara.

Oleh karena itu, di beberapa negara FLFP seringkali mengalami ketidakadilan dalam sektor industri berupa gaji tidak seimbang, jam kerja yang melebihi batas, atau kesempatan kerja minimum terhadap perempuan (Lim). Ketimpangan tersebut diamini oleh data ILO, bahwa disparitas gender yang terjadi saat ini dalam sektor ketenagakerjaan perempuan tidak mendapatkan gaji atas pekerjaannya serta pembagian jam kerja yang tidak seimbang, laki-laki mendapatkan porsi jam kerja yang lebih panjang (lebih dari 48 jam), sementara perempuan mendapatkan porsi jam kerja yang lebih sedikit (kurang dari 35 jam). Selama ketidaksetaraan tersebut masih berlangsung, maka kesetaraan gender tidak akan berhasil dalam sektor pasar tenaga kerja (ILO, 2019).

FLFP tergolong rendah ketika menyangkut pada negara berkembang, seperti negara-negara Timur Tengah, Afrika Utara, Afrika sub-Saharan, Asia Timur, dan Asia Selatan. India menjadi salah satu negara di Asia Selatan dimana perempuan mengalami penurunan partisipasi kerja baik di wilayah rural maupun urban (Verick, 2014). Faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan antara lain adalah rendahnya akses pendidikan yang berkualitas dan pengembangan *skill*, faktor sosiokultural, dan *gender-based discrimination*. Faktor-faktor tersebut berakhir pada sulitnya akses mobilitas perempuan dalam memperoleh pekerjaan yang setara dengan laki-laki, dimana secara norma tradisional perempuan dipaksa untuk menuntaskan kewajibannya sebagai perempuan yang berdiam diri dirumah. Hal ini juga menunjukkan bentuk dari warisan kolonial di sektor ekonomi, dimana diskriminasi gender dimanfaatkan untuk menggerus potensi pengembangan terhadap partisipasi kerja perempuan

dengan menempatkan perempuan dibawah laki-laki.

Tabel 2.3 Persebaran Perempuan dalam Mobilitas Profesi

Bidang profesi	Laki-laki (%)	Perempuan (%)
Agrikultur	38.1	62.9
Tambang dan Penggalian	0.4	0.1
Manufaktur	11.8	11.2
Listrik, Air, dsb	0.7	0.2
Konstruksi	15.6	5.0
Perdagangan, hotel, dan restoran	14.7	5.9
Transportasi dan komunikasi	7.5	1.2
Pelayanan lainnya	11.2	13.6

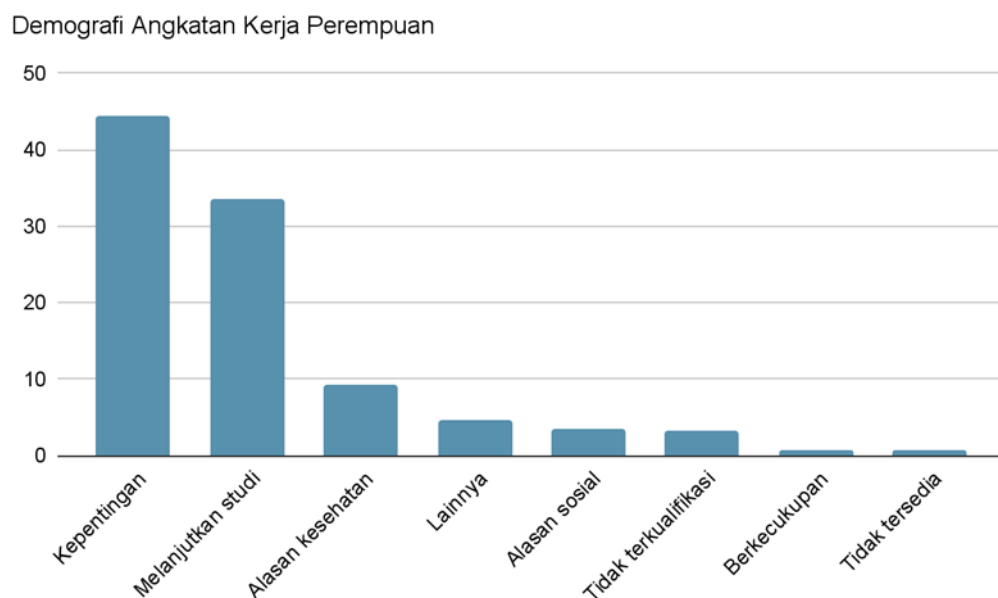
Sumber: *Ministry of Labour and Employment, 2023*

Merujuk pada pemerataan profesi, tabel diatas menunjukkan bahwa dari seluruh bidang profesi yang digeluti oleh angkatan kerja India, perempuan lebih banyak dan mayoritas bekerja di sektor agrikultur. Sementara laki-laki mendapatkan porsi yang merata di beberapa sektor industri dan manufaktur dengan angka yang tetap dominan dibanding dengan perempuan. Dengan begitu, perempuan memiliki jumlah angkatan kerja yang cukup baik hanya penyebaran perempuan di ketenagakerjaan tidak merata. Oleh karena itu, partisipasi angkatan kerja perempuan di India cenderung meningkat apabila ditinjau dari laporan statistik Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan India.

Partisipasi pekerja perempuan di India dinilai rendah sebab terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar lahirnya permasalahan ketenagakerjaan perempuan. Dalam pekerjaan domestik dan agrikultur, perempuan seringkali tidak mendapatkan bayaran atau dibayar tidak sesuai dengan beban kerja yang dihadapi. Hal ini berkaitan dengan adanya disparitas peroleh gaji antara pekerja laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki mendapatkan upah yang sesuai dengan beban kerja,

sementara perempuan bernasib sebaliknya. Fenomena tersebut bermuara pada konstruksi sosial kasta yang dilanggengkan oleh Inggris, sehingga rentan terhadap bias gender, dimana beban kerja, waktu, dan upah yang menjadi isu ketenagakerjaan perempuan di India menjadi dampak lanjutan adanya ketimpangan partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki.

Grafik 2.1 Persentase Absensi Perempuan pada Partisipasi Angkatan Kerja India

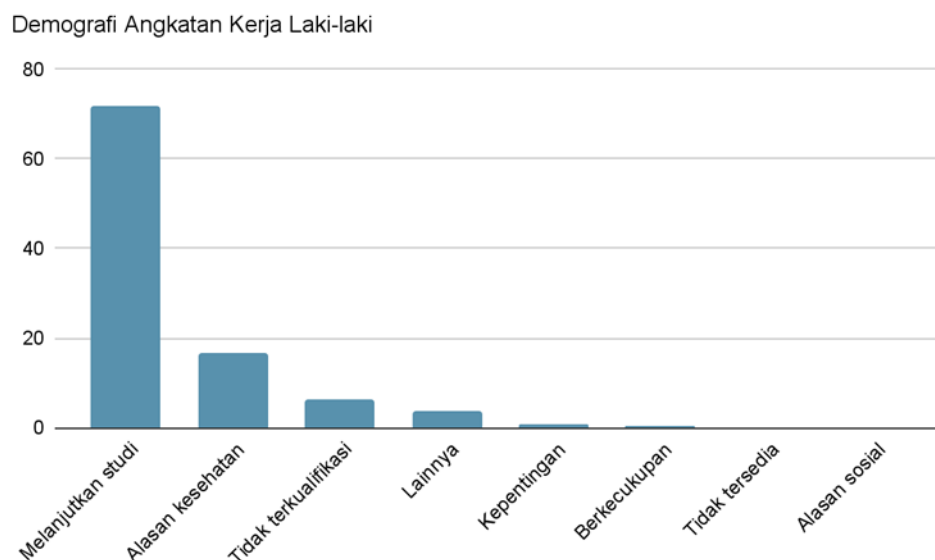


Sumber: *Ministry of Labour and Employment India, 2023*

Berdasarkan gambar diatas, terdapat perbedaan yang mencolok dalam menjelaskan partisipasi perempuan dan laki-laki pada angkatan kerja di India. Pada gambar 3.2 menunjukkan bahwa absennya partisipasi perempuan di angkatan kerja India 44.5% disebabkan oleh adanya konstruk sosial yang mengikat perempuan untuk bertanggung jawab secara penuh pada sektor domestik, yakni menjadi istri dan ibu. Faktor yang linier juga ditunjukkan penyebab rendahnya perempuan pada partisipasi kerja adalah alasan sosial dan tidak terpenuhinya kualifikasi pada

perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di India belum mampu memenuhi kualifikasi dalam mendapatkan pekerjaan yang layak disebabkan karena terbatasnya gerak perempuan hanya pada sektor domestik karena kuatnya konstruk sosial di India, sehingga potensi yang dimiliki oleh perempuan di India tidak terfasilitasi secara maksimal.

Grafik 2.2 Persentase Absensi Laki-laki pada Partisipasi Angkatan Kerja India



Sumber: *Ministry of Labour and Employment India, 2023*

Lain hal dengan faktor yang menghambat laki-laki dalam angkatan kerja di India. Dijelaskan pada gambar 3.3 bahwa alasan laki-laki tidak tergabung dalam angkatan kerja di India disebabkan oleh sebanyak 71.7% laki-laki ingin melanjutkan pendidikan mereka. Berdasarkan persentase tersebut, hal ini menunjukkan bahwa laki-laki memperoleh kesempatan lebih besar dalam mengembangkan potensi diri mereka melalui pendidikan. Hal ini tidak didapatkan oleh perempuan di India karena konstruksi sosial yang telah mengakar di negara

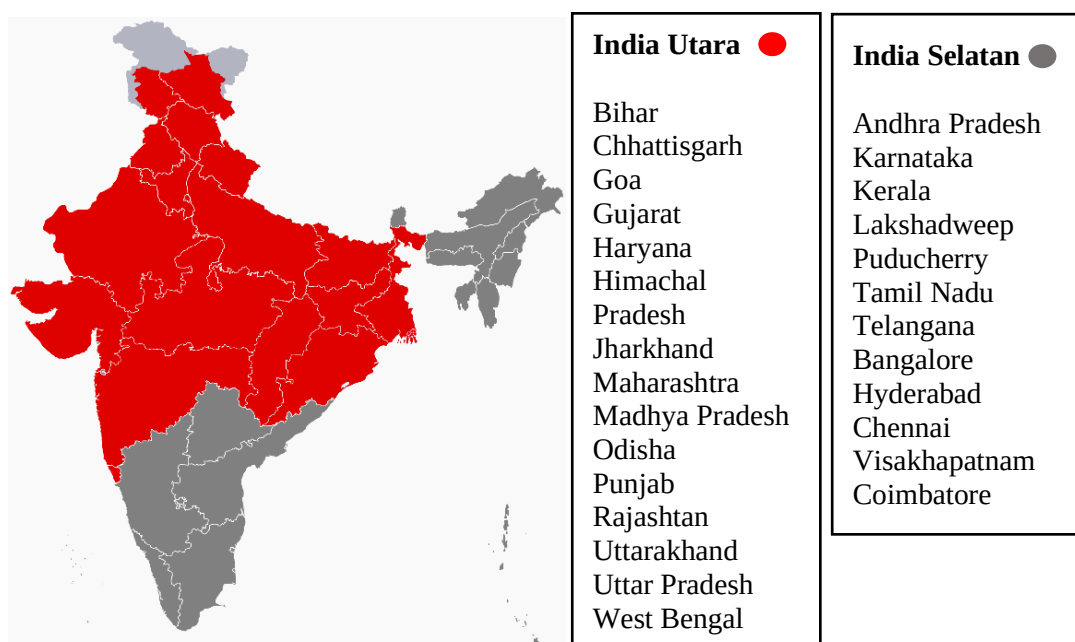
tersebut, terutama di daerah marjinal, sehingga akses perempuan terhadap pembangunan semakin kecil.

Perbedaan kesempatan tersebut menunjukkan bahwa jarak yang hadir antara perempuan dan laki-laki pada sektor ketenagakerjaan merupakan masalah pembangunan di India yang belum mampu memberikan hak dan kesempatan yang setara dalam berkontribusi terhadap negara. Konsep gender pembangunan dalam WID menekankan pada hadirnya kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh hak yang diberikan oleh negara. Selain itu, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara. Oleh karena itu, meningkatnya angkatan kerja perempuan di India menunjukkan bahwa persentase tersebut berdampak pada pembangunan India, namun rendahnya pemerataan kesempatan mobilisasi profesi bagi perempuan India menyebabkan ketidakadilan sosial semakin mengakar.

Di negara selatan, khususnya India, permasalahan disparitas gender menjadi isu yang mengakar di negara tersebut. Mobilitas perempuan terbatas pada sektor rumah tangga dengan tidak diberikannya kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan porsi lapangan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Pendidikan menjadi basis bagi perempuan di India untuk dapat memenuhi kompetensi terkait dengan *decision-making*, mobilisasi profesi, atau menyuarakan opini. Dalam sistem kasta yang mengakar di India, perempuan memerlukan pendidikan untuk setidaknya memperoleh hal yang sama dengan laki-laki meskipun sistem kasta tersebut bersifat mengikat. Sebab, pendidikan tidak hanya menjadi alat ketahanan ekonomi bagi perempuan, namun juga merubah status yang mengikat

tersebut di lingkup sosial yang lebih besar. Hal tersebut menjadi tujuan dari perempuan untuk mendapatkan kesempatan mobilitas sosial. Disparitas ini tidak hanya ditunjukkan dalam ruang komunitas, melainkan individu juga dapat memperlihatkan bagaimana perbedaan antara laki-laki dan perempuan seringkali terjadi di sektor pendidikan. Misalnya, seorang ibu yang berpendidikan rendah akan menitikberatkan beban sosial pada anak perempuannya dan hal tersebut akan terus terulang dari generasi ke generasi (Bose, 2012, pp. 86-87). Kemudian, permasalahan mobilitas profesi yang menjadi domino dari hadirnya warisan kolonial, berdampak pada perempuan India di seluruh lapisan termasuk di dua wilayah besar India Selatan dan India Utara.

Gambar 2.3 Peta India (India Selatan dan India Utara)



Gambar 2.1 Peta India (India Selatan dan India Utara)

Sumber: Wikipedia India Utara dan India Selatan

Keterlibatan perempuan di India dalam mobilisasi sosial cenderung sulit, terutama dalam sektor pekerjaan. Di dua wilayah besar India, India Selatan dan Utara memiliki perbedaan yang sangat kontras terkait dengan perkembangan dan pembangunan masyarakatnya. Dalam sektor pendidikan dan kesehatan, India Selatan menjadi wilayah lebih maju dan masyarakatnya pun mendapatkan cukup penyediaan sekolah dan fasilitas kesehatan, dimana hal dasar tersebut telah terpenuhi pada masyarakat India Selatan. Pemenuhan kebutuhan dasar dari pendidikan dan kesehatan memiliki keterkaitan pada mobilisasi sosial dari masyarakatnya. Kemudian, dari segi demografi, India Utara memiliki populasi lebih banyak daripada India Selatan, sehingga hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat urban dan rural tidak merata. Lebih ekstrem, perempuan yang lahir atau hidup di India Selatan, berpotensi mendapatkan hidup lebih layak dibanding di India Utara (BBC, 2022). Berdasarkan data dari *Ministry of Agriculture and Farmers Welfare*, partisipasi perempuan rural dalam sektor agrikultur di tahun 2021 menunjukkan bahwa di India Selatan partisipasi petani perempuan berada di angka 8.990.000 sementara di India Utara adalah 10.961.000 (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, 2021).

Selain itu, konstruksi sosial yang mengakar di India Utara menelan lebih banyak nilai-nilai maskulinitas dan patriarki berdasar pada sistem agrikultur di daerah tersebut. Hal ini berkaitan dengan sejarah kolonisasi dan modernisasi di masa penjajahan Inggris. Mengenai sektor agrikultur, India Utara dengan konstruk sosial yang tinggi, mengotak-ngotakkan perempuan berdasar pada kepemilikan tanah. Banyak perempuan yang tidak memiliki tanah pertanian, bekerja pada lahan

keluarga atau orang lain akan dianggap sebagai ‘kewajiban’ dan tidak jarang mendapat upah rendah. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi India Selatan yang mengalami kondisi ‘lebih baik’ pada sektor agraria (Sharma, 1984). Dalam sektor agrikultur pula, perempuan atau pekerja tani yang berada di India Utara dan Selatan berbeda dalam kesejahteraan agraria. India menjadi negara dengan aktifitas pertanian yang tinggi dan penyumbang GDP besar di India, namun perempuan di India Selatan lebih mudah melakukan mobilisasi dari satu desa ke desa lain menggunakan teknologi traktor, sementara India Utara belum secara merata mendapatkan teknologi pertanian tersebut terutama di pedesaan. Oleh karena itu, ketimpangan gender yang hadir di sektor agrikultur di dua wilayah tersebut tidak hanya menunjukkan perbedaan kualitas dan pemberdayaan yang diterima perempuan, melainkan menciptakan kesenjangan yang didasari oleh kasta tersebut semakin kuat dan membuat perempuan di India Utara semakin terbatas dalam mengakses pembangunan secara optimal (Duvvury, 1989).

2.3 Kebijakan Pemerintah India dalam Upaya Penanggulangan Ketimpangan

Permasalahan sosial dalam mobilitas profesi perempuan di India, telah diupayakan solusi-solusi oleh pemerintah India. Namun absensi dari pemerintah di wilayah kecil membuat kebijakan dan program pembangunan kurang maksimal. Hal ini didukung pula dengan sistem pemerintahan India yang federal, dimana setiap negara bagian memiliki pemerintah yang berwenang. Sistem tata kelola politik dan pemerintahan India adalah Demokratik Sekuler dengan bentuk pemerintahan parlementer dan struktur federal. Terdapat Perdana Menteri sebagai bagian dari parlementer dan Presiden yang menjadi kepala negara secara

konstitusional. Dalam struktur federal, India terbagi menjadi beberapa negara bagian yang dulunya merupakan daerah bekas jajahan Inggris yang berkuasa dan negara bagian tersebut juga terdapat Dewan dan Kepala Menteri sebagai kekuasaan politik di satu wilayah tersebut. Oleh karena itu, terdapat sistem administrasi di tingkat pusat, negara bagian, dan lokal dimana dalam lingkup tersebut memiliki aturan dan implementasi kebijakan masing-masing di wilayah bagian (India Governance and Administration, n.d.). Berdasarkan sistem pemerintahan yang terbagi menjadi sistem pusat dan negara bagian, penyelenggaraan politik di dua wilayah besar, India Selatan dan India Utara. Aktivitas politik lebih banyak terpusat di India Selatan sehingga implementasi kebijakan yang menysasar pada pembangunan sosial dan ekonomi juga lebih efektif di wilayah tersebut dibanding dengan India Utara (Kant, 2023).

Pemerintah India memiliki lembaga pemerintahan yang memiliki fokus terhadap pembangunan perempuan di India. The National Commission for Women (NCW) merupakan salah satu lembaga pemerintah India yang bergerak di bidang hukum dalam meningkatkan status perempuan dan melakukan pemberdayaan ekonomi melalui program pemerintah dan didasari oleh undang-undang domestik (The National Commission for Women, n.d.). Selain itu, Kementerian Pembangunan Perempuan dan Anak juga merupakan bagian dari konstitusi India dalam upaya pemerintah untuk menciptakan perlindungan dan kesetaraan hak dan kewajiban bagi perempuan India. Lembaga ini lebih banyak menyoroti pada pembangunan perempuan di India yang harus didasari pada sudut pandang gender. Kementerian Pembangunan Perempuan dan Anak berupaya mengadvokasi

pembangunan perempuan di berbagai bidang, baik itu pertanian maupun industrial (Ministry of Women and Child Development, 2015). Kedua Lembaga ini lebih banyak bergerak pada fasilitasi kesejahteraan perempuan dan penanganan isu disparitas melalui kode etik dan undang-undang sebagai landasan hukum yang sah, sehingga basis tersebut memperkuat penanganan permasalahan ketimpangan gender yang terjadi di wilayah rural maupun urban.

Tabel 2.4 Kebijakan Pemerintah India

Nama UU	Tentang UU	<i>Addressed Problem</i>
Equal Remuneration Act 1976	Penghapusan diskriminasi upah berdasarkan gender.	Pemberian gaji kepada setiap orang yang bekerja di sektor informal atau formal berdasarkan Code on Wages (2019) sebagai tindak lanjut isu kesetaraan gender terhadap gaji.
National Policy for Farmers 2007	Memperkuat agenda gender mainstreaming dengan pengembangan akademis dan kewirausahaan perempuan di agrikultur.	Perempuan di sektor agrikultur dan berada di wilayah rural tidak mendapatkan akses pengetahuan dan pelatihan yang layak sehingga perempuan hanya bekerja sebagai pekerja kasar.
National Policy for Women 2016	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja	Keterbatasan perempuan dalam memperoleh kesempatan pekerjaan terhadap profesi yang disebabkan oleh status sosial, gender, dan kasta.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Upaya pemerintah dalam penanganan isu disparitas gender di India terutama dalam ketenagakerjaan tertuang dalam undang-undang domestik India mengenai perempuan dan laki-laki dalam perolehan upah serta pembagian waktu kerja. *Equal Remuneration Act 1976* adalah undang-undang yang dirancang untuk menghapus diskriminasi upah berbasis gender. Undang-undang ini melarang segala bentuk diskriminasi upah berdasarkan gender dan menekankan prinsip upah yang sama untuk pekerjaan yang setara dan memastikan perempuan menerima upah yang sama

untuk pekerjaan yang identik atau serupa. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan keadilan, non-diskriminasi, dan kesempatan yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan, serta mendorong lingkungan kerja yang lebih adil (Ministry of Labour & Employment, n.d.).

Dua kebijakan selanjutnya adalah National Policy for Farmers 2007 dan National Policy for Women 2016 yang membahas mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan perempuan terhadap peningkatan partisipasi kerja. National Policy for Farmers 2007 menyoroti perempuan di wilayah rural yang mayoritas bergerak pada sektor agrikultur. Kebijakan ini berupaya memfasilitasi perempuan terhadap pertanian berkelanjutan dengan membentuk aturan yang mengikutsertakan perempuan di sektor agrikultur dalam kepemilikan lahan dan kebutuhan lainnya (Department of Agriculture & Cooperation Ministry of Agriculture Government of India, 2007). Selain itu, kebijakan selanjutnya adalah National Policy for Women tahun 2016 yang secara umum menjelaskan perlindungan dan kesempatan bagi perempuan di India untuk masuk ke dalam angkatan kerja yang aktif dan setara (Ministry of Women and Child Development, 2016).

Pemerintah India juga memberlakukan beberapa program yang mendukung pemberdayaan perempuan pada isu ketenagakerjaan di India. **Vigyan Jyoti** dikeluarkan pemerintah melalui *Department Ministry of Science and Technology* untuk mengatasi kurangnya keterwakilan perempuan di bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM). Langkah awal yang dilakukan pemerintah India adalah menyoroti siswa/i sekolah menengah atas untuk memberikan arahan dan

dorongan kepada perempuan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi dan berkarir di bidang STEM tersebut. Skema selanjutnya, pemerintah India menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dan perguruan tinggi dengan mengadakan kegiatan kunjungan laboratorium atau industri, konseling orang tua dan anak, serta kuliah atau kelas khusus sains dengan tujuan mendorong motivasi perempuan untuk memiliki jenjang karir di bidang STEM (India Science and Technology, 2022). Melalui program ini, pemerintah berhasil mengikutsertakan 30.000 anak perempuan kelas IX-XII dari 200 distrik di India, dukungan penelitian untuk 370 ilmuwan perempuan, dan pelatihan HAKI kepada 99 ilmuwan perempuan (Ministry of Science and Technology, 2022, p. 5).

Program selanjutnya adalah **Skill India Mission** yang dikeluarkan oleh *Ministry of Skill Development and Entrepreneurship*. Program ini secara khusus dirancang oleh pemerintah India untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas perempuan dalam sektor pekerja industri melalui pemberian pelatihan kepada perempuan. Program turunan ini adalah *Vocational Training Programme for Women* dan *Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)* yang menyasar kepada perempuan dari berbagai tingkat sosial-ekonomi dan kelompok umur yang berbeda. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memberikan peluang kepada perempuan untuk merangsang peluang kerja melalui keterampilan dan kewirausahaan serta memperoleh kestabilan lapangan pekerjaan (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, 2020). Program ini berhasil mempromosikan inklusi dan keberagaman di seluruh program khususnya bagi penyandang disabilitas. Selain itu, India telah bermitra dengan 11 negara dalam agenda keterampilan yang

mempromosikan mobilitas global. Skill India Mission juga mendukung seluruh misi nasional dan bermitra dengan 18 dari 20 kementerian di India (Hussain, 2020, p. 4).

Pemerintah India juga menawarkan program pinjaman yang ditujukan kepada kelompok marjinal dalam pemberdayaan sektor kewirausahaan. **Stand Up India** diluncurkan pada tahun 2016 dengan memberikan pinjaman modal kepada pengusaha yang terdata dalam Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribes (ST), dan perempuan diatas usia 18 tahun. Program ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat keadaan sosial-ekonomi masyarakat India, terutama perempuan dalam berwirausaha. Melalui skema pemerintah India ini, Stand Up India berhasil memberikan manfaat kepada pengusaha perempuan dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 93.094 atau 81% dari total pinjaman program (BYJU, 2022).

Berdasarkan undang-undang dan program pemerintah terhadap pembangunan perempuan tersebut, dua wilayah besar India Selatan dan India Utara memiliki kepala pemerintahan di setiap negara bagian yang mengatur wilayah tersebut dalam implementasi kebijakan. Undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat, dalam pengimplementasiannya diserahkan pada kewenangan negara bagian, dalam hal ini adalah negara bagian di India Selatan dan India Utara. Oleh karena itu pembangunan dan implementasi kebijakan pemerintah India dilakukan dibawah pengawasan pemerintah negara bagian, khususnya dalam penelitian ini adalah di India Utara.

2.4 Keterlibatan Aktor Non-negara dalam Menekan Ketimpangan Profesi Pekerja Perempuan India

Keikutsertaan organisasi non pemerintah dalam menekan ketimpangan terhadap pekerja perempuan di India menjadi subjek baru yang menggambarkan situasi sosial dan ekonomi India terhadap profesi pekerja perempuan saat ini. Organisasi non pemerintah berupaya mengadvokasi permasalahan akar rumput, terutama terkait dengan pemberdayaan dan pembangunan perempuan di India dalam lingkup ekonomi dan sosial. Permasalahan pada tenaga kerja perempuan India Utara di sektor agrikultur membutuhkan perpanjangan tangan dari kebijakan dan program pembangunan pemerintah India dalam mewadahi isu tersebut. Pemerintah telah menyorot secara khusus pada permasalahan pertanian di National Policy for Farmer, yang menjelaskan bagaimana peran aktif perempuan di agraria harus difasilitasi secara optimal melalui pemerintah regional. Selain itu, program pemberdayaan perempuan juga menyorot pada sektor kewirausahaan dan agraria agar petani perempuan dapat terberdaya dan mampu dalam mengolah kemampuan diri selain menjadi petani, sehingga potensi untuk melakukan migrasi profesi dapat terbuka. Namun, program dan kebijakan pemerintah belum secara maksimal memenuhi hak yang seharusnya diterima oleh perempuan rural India, sehingga peran serta dari aktor non-negara dapat membuka keran pembangunan kepada perempuan, terutama ketenagakerjaan.

Organisasi lokal maupun internasional yang memiliki advokasi pada pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kapabilitas profesi mereka banyak bergerak di Utara India, antara lain World Vision India, CARE India, AKRSP (I),

FLO by FICCI, Centre for Catalyzing Change (C3), atau Self Employed Woman's Association (SEWA). Organisasi tersebut mengadvokasi pada permasalahan ketenagakerjaan perempuan India yang tidak linier dengan basis pembangunan internasional, yakni kesetaraan dan partisipasi aktif perempuan pada *livelihood*. World Vision India bergerak pada kesejahteraan dan keamanan anak-anak India, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, dan pelatihan, dimana hal tersebut menjadi fondasi awal bagi lahirnya sumber daya yang berkualitas. World Vision India merupakan bagian dari konfederasi internasional World Vision yang juga memiliki fokus pada perlindungan anak-anak (World Vision India, 2024). CARE India pada sektor agraria mengadvokasi pemberdayaan perempuan petani di daerah Gujarat dengan mengaliansikan dengan kemampuan wirausaha. CARE India juga merupakan bagian dari konfederasi internasional CARE Internasional yang memiliki visi-misi dan objektif pada kesetaraan gender (CARE India, 2023). AKRSP (I), FLO by FICCI, dan C3 merupakan organisasi lokal India yang secara khusus menyasar pada lokus India Utara dalam memberdayakan petani perempuan untuk memaksimalkan potensi petani di daerah pedesaan. Sementara itu, SEWA merupakan serikat pekerja perempuan di India yang berfokus pada pemenuhan hak-hak perempuan dalam hal upah yang setara. SEWA mendapatkan rekognisi internasional karena advokasi yang diusung serikat tersebut telah sampai pada ILO (Self Employed Women's Association, 2024).

Konsiderasi lokus di wilayah India Utara didasari pada penduduk yang padat dan permasalahan petani perempuan yang memiliki partisipasi tinggi namun tidak terberdaya dikarenakan hambatan sosio-struktural dan historikal yang mengakar di

masyarakat. Hal ini menjadi urgensi bahwa sektor agraria India Utara dapat dimaksimalkan dengan baik tetapi tetap memberikan pelayanan dan hak yang seharusnya diterima oleh pekerja perempuan di wilayah tersebut. Oleh karena wilayah India Selatan mendapatkan setidaknya regulasi dan program suportif terhadap perempuan dibandingkan India Utara, aktor non-negara menjadi perepanjangan tangan peran pemerintah India untuk membantu memaksimalkan sumber daya alam dan manusia di India Utara. Peran daripada organisasi C3, AKRSP (I), dan CARE India pada sektor agrikultur di India Utara menjadi subjek pada optimalisasi NGO tersebut terhadap partisipasi pekerja perempuan di India dalam mewadahi migrasi profesi yang terhalang oleh kasta dan warisan kolonial. Organisasi tersebut memiliki basis yang linier dari nilai-nilai advokasi yang didasari pada kesetaraan gender, partisipasi perempuan, dan pemberdayaan melalui program *livelihood*.